

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis bahas di atas, maka analisis yuridis pewarganegaraan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia perspektif *siyasah dusturiyah* dapat disimpulkan bahwa:

1. Pewarganegaraan di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu naturalisasi biasa (pasal 9) melalui prosedur ketat dan Keputusan Presiden, naturalisasi perkawinan campuran (pasal 19) cepat dan elektronik melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM dan naturalisasi istimewa (pasal 20) jalur cepat berdasarkan jasa atau kepentingan negara dengan persetujuan Presiden dan DPR. Pewarganegaraan juga ditujukan bagi diaspora untuk memberikan kepastian hukum, menumbuhkan kepatuhan terhadap negara, serta mendukung kemajuan dan manfaat bagi bangsa Indonesia.
2. Dalam perspektif *siyasah dusturiyyah*, pewarganegaraan dipandang sebagai perjanjian politik yang menekankan hubungan timbal balik antara warga negara dan negara, berupa kewajiban patuh serta hak dan kewajiban yang timbul. Dalam Islam, prinsipnya keterbukaan dan kesediaan individu untuk bergabung, menaati aturan, dan menjaga keamanan negara, sedangkan di Indonesia, prinsipnya prioritas dan selektif, menekankan keterikatan bangsa (diaspora), membuka peluang bagi orang asing sesuai kepentingan nasional, serta menegaskan kepatuhan terhadap Pancasila dan UUD 1945, namun tetap mengedepankan prinsip hak dan kewajiban.

5.2 Saran

Hasil dan akhir dari penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan bisa berguna untuk:

1. Bagi warga negara asing atau diaspora yang akan mengajukan pewarganegaraan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk mempelajari dan memahami mekanisme pewarganegaraan Indonesia.
2. Bagi seluruh rakyat Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pandangan terhadap naturalisasi. Melalui perspektif *siyasah dusturiyah*, penulis berharap masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dapat memahami konsep kenegaraan dalam negara Islam (*dar*), di mana agama tidak hanya dipandang sebagai urusan akhirat semata, melainkan juga menjadi bagian dari seluruh aspek kehidupan, khususnya dalam persoalan kenegaraan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian pewarganegaraan yang dilakukan penulis berfokus pada analisis undang-undang beserta peraturan turunannya, sehingga kajian ini masih terbatas pada dimensi normatif. Keterbatasan tersebut menyebabkan penelitian ini belum menyentuh secara mendalam fakta lapangan terkait mekanisme pewarganegaraan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian yang lebih menekankan pada dimensi empiris.
4. Bagi pemerintah, perspektif *siyasah dusturiyah* yang dihadirkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru mengenai ketatanegaraan Islam, khususnya sebagai bahan pertimbangan dalam kemungkinan perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyah, Siti. 2022. *Buku Ajar Ilmu Negara*. Jawa Timur: Pustaka Ilalang Group.
- Al-Ahsan, Abdullah. 1992. *Ummah or Nation? Identity Crisis in Contemporary Muslim Society*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Al-Mawardi. 2014. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan khilafah Islam*, Terj. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Mubarakfuri, Shafiyyurrahman. 1997. *Sirah Nabawiyah*, Terj. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qardhawi, Dr. Yusuf. 1994. *Minoritas Non Muslim Di Dalam Masyarakat Islam*, Terj. Bandung: Karisma.
- Al-Tahtawi, Rif'at. 2012. *al-Murshid al-Amin li al-Banat wa al-Banin*. Kairo: Dar al-Kitab al-Masri.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2009. *Daulah Islam*, Terj. Jakarta: HTI Press.
- Anvar, Allamuratov. 2024. "The Civil Society of Ancient Rome." *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, (Edisi 2): 1–5.
- Ariski, Iis, et all. 2023. "Hakikat Kewarganegaraan dan Keimigrasian Dalam Tata Hukum Indonesia" Volume 2 (Edisi 2): 290–302.
- Armia, muhammad siddiq. 2022. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Audah, Abdul, Qadir. 2008. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu.
- Awalin, Hanif et all. 2024. "Implikasi Pencatatan Sipil Akibat Perbedaan Asas Kewarganegaraan Yang Dianut Antar Negara." *Media Hukum Indonesia* Volume 2 (Edisi 3). <https://zenodo.org/records/12176900>.
- Aziz, Noor. 2011. "Laporan Kompendium Hukum Bidang Kewarganegaraan." Puslitbang BPHN.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. 2024. "Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia (Ribuan Jiwa)" <https://sulut.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTU4IzI=/jumlah-penduduk-menurut-provinsi-di-indonesia.html>. 2024."
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. 2023. "Problematisasi Konstitusionalitas Naturalisasi Di Indonesia." *pancasilan:jurnal keindonesiaan* Volume 3 (Edisi 1): 100–112.
- CNN Indonesia. 2025. "Daftar Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Masih Aktif." 2025. <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20250225143332-1421202279/daftar-pemain-naturalisasi-timnas-indonesia-yang-masih-aktif>.
- Cynthia, Femmie. 2021. "Status Kewarganegaraan Ganda di Indonesia." *Jurnal Hukum Adigama* Volume 4 (Edisi 2): 2223–2245.
- Darmidi et all. 2024. "Syarat Pewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia" Volume 2 (Edisi 1): 22–27.
- Denny, Frederick Mathewson. 1975. "The Meaning of Ummah in the Qur'an." *History of Religions* Volume 15 (Edisi 1): 34–70.
- Disalvo, Daniel. Carlo Invernizzi Accetti. 2025. "Civics, Partisanship, and the Academy." *National* [https://www.nationalaffairs.com/publications/detail/civics-partisanship-and-academy? Affairs](https://www.nationalaffairs.com/publications/detail/civics-partisanship-and-academy?Affairs).
- Djazuli. 2003. *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Dziak, Mark. 2023. "Athenian Democracy." <https://www.ebsco.com/research-starters/literature-and-writing/athenian-democracy>. EBSCO.
- Efendi, Virga. Rizqi, Fathur. 2025. "Analisis Syarat Administratif Proses Pewarganegaraan Di Indonesia Dalam Perspektif Pelayanan Publik." *Veritas Et Justitia* Volume 10 (Edisi 2): 453–474.
- Effendi, Tonny Dian. 2022. "Strategi Pelibatan Diaspora Indonesia Dalam Diplomasi Publik." *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan* Volume 14 (Edisi 1): 18–42.
- Fadhulurrahman, Irfan. 2024. "10 Negara Dengan Penduduk Terbanyak di Dunia Desember 2024." <https://databoks.katadata.co.id/index.php/demografi/statistik/c82407202d05b30/10-negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-desember-2024>.
- Faruq, Umar et all. 2024. "Masa Taqlid Ke Masa Jumud: Dinamika Perubahan Hukum Dalam Sejarah Islam." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* Volume 3 (Edisi 2): 150–154.
- Fa ru qī , Isma'ī l Ra jī al, dan Lois Lamya ' al Fa ru qī . 2014. "The Sunnah." In *In The Qur'an and the Sunnah*, Herndon: International Institute of Islamic Thought.
- Hadi, Fazlurrahman. 2018. *Rifa'ah Thahtawi Sang Pembaharu Pendidikan Islam*. Surabaya: UMSurabaya Publishing.
- Hakim, Faridl et all. 2022. "Analisis Stilistika Kata aL-Din, aL-Din aL-Qayyim, aL-Din aL-Khalis, Dinillah Dan Millah Dalam aL-Qur'an." *Al-Itqan* Volume 8 (Edisi 1): 25–38.
- Hosna, Asmak. Wijanarko, Dwi. Sibuea, hotman. 2021. *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Iqbal, Muhammad. 2018. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Ishaq. 1955. *The Life Of Muhammad, Terj Sirah Rasul Allah*. Oxford: Oxford University Press. <https://archive.org/details/IbnIshaq-SiratuRasulAllahtranslatorA.Guillaume/page/n1/mode/1up>.
- KakaKhel, Dr Muhammad Nazeer. "The Rise Of Muslim Umma At Makkah And Its Integration," 8–23. Kaldun, Ibnu. 1986. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Terj. Jakarta: Pustaka Firdaus.

https://archive.org/details/muqodimah_202008/page/n1/mode/2up.

Kalidjernih, Freddy. Winarno, Winarno. 2019. "Dari terminologi ke substansi pendidikan kewarganegaraan: Implikasi terhadap revitalisasi Pancasila." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* Volume 16 (Edisi 1): 38–50. <https://doi.org/10.21831/jc.v16i1.25311>.

Lings, Martin. 1991. *Muhammad his life based on the earliest sources*. Islamic Texts Society.

Malik, Maszlee. 2018. "Fiqh al-Muwatanah (Fiqh of Citizenship): A New and Inclusive Islamic Approach for Multi-religious Societies." *Penang Institute Issues*, 1–18.

Marwan, Marwan. 2024. "Tinjauan Yuridis Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *Public Service And Governance journal* Volume 5 (Edisi 1): 330–48.

Mubarokah, Lailatul, Silna Firdausa Nuzula, dan Eza Cahya Dinda. 2025. "Kajian Morfologis Ayat Al-Al-Qur'an." *Jurnal Al-Fikrah* Volume 7 (Edisi 1): 30–41.

Muda, Geograf. 2020. "Luas dan Batas Wilayah Indonesia." 2020. <https://www.geografi.org/2020/07/luas-dan-batas-wilayah-Indonesia.html>.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. Al-Munawwir. Surabaya: Pustaka Progresif. <https://drive.google.com/file/d/1B39YRy2habPrc6hh1ndRPJfQF3SgoY4/view>.

Nabi, Ghulam. 2022. "Treaty of Hudabiyah and Bait-i Ridwan (6 th year of Hijrah)." *Anusandhanvallari* Volume 2022 (Edisi 1): 43–47.

Nasional, Badan Pembinaan Hukum, dan Kementerian Hukum Republik Indonesia. 2024. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional."

Naskah Piagam Madinah. Von Edison Alouisci.

Nawawie, Hasyim. 2014. *Tarikh Tasyri-Hasyim Nawawie*. Surabaya: Jenggala Pustaka Utama.

Pedroza, Luicy. 2020. "A Comprehensive Framework for Studying Migration Policies (and a Call to Observe Them beyond Immigration to the West).". Hamburg: German Institute of Global and Area Studies (GIGA). <http://www.jstor.org/stable/resrep24820>.

Pramono, Muhamad et al. 2023. "Ibn Khaldun's Perspective on the Social Contract (Bai'at) and Its Implementation in the State System." *Jurnal Ushluddin* Volume 31 (Edisi 1): 85–99. <https://doi.org/10.24014/Jush.v31i1.18896>.

Prihantoro et al. 2023. "Islamic Law and the Politics of Nation-State: Debating Citizenship Fiqh Through the Al-Maskut 'Anhu Discourse." *AHKAM* Volume 23 (Edisi 2): 307–328.

Purinton, Malcolm. tt. "The Atlantic Revolutions." OER Project.

<https://www.oerproject.com/OER-Materials/OER-Media/HTMLArticles/Origins/Unit7/The-Atlantic-Revolutions>.

- Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 4. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
<https://archive.org/details/BalaiPustakaKamusBesarBahasaIndonesiabOk.org/page/n9/mode/2up>.
- Putra, Cucun. Purnomosidi, Arie. 2025. "Implementasi Terkait Proses Naturalisasi Pemain Sepakbola Asing Atau Diaspora Dalam Undang Undang Kewarganegaraan Indonesia." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* Volume 3 (Edisi 2): 684–692.
- Putra, Zulfikar. Wajdi, Farid. 2021. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Malang: Ahlimedia Press.
- Putri, Mas et al. 2023. *Kewarganegaraan: Teoretis dan Praksis*. Malang: Future Science. Qurthubi. 2008. *Tafsir Al Qurthubi Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Azzam.
[https://archive.org/details/tafsir-qurthubi/Tafsir Qurthubi 01/](https://archive.org/details/tafsir-qurthubi/Tafsir%20Qurthubi%2001/).
- Rezaalf, M. 2022. "Konsep Kewarganegaraan dan Pengertian Warga Negara.le." 2022.
[https://www.mandandi.com/2022/02/konsep kewarganegaraan-dan-pengertian.html](https://www.mandandi.com/2022/02/konsep-kewarganegaraan-dan-pengertian.html). Rosenthal, Perl. Erman, Sam. 2024. "Inventing Birthright : The Nineteenth Century Fabrication of jus soli and jus sanguinis." *Law and History Review*, (Edisi 42): 421–48. <https://doi.org/10.1017/S0738248024000221>.
- Rousseau, Jean Jacques. 2025. *The Social Contract* Terj. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Saraswati, Retno. 2010. *Ilmu Negara*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponogoro.
- Sejersen, brondsted. 2008. "I Vow to Thee My Countries The Expansion of Dual Citizenship in the 21st Century." *The International Migration Review* Volume 42 (Edisi 3): <https://www.jstor.org/stable/27645265>0AJSTOR. 523–549.
- Sholihuddin, Muh. 2021. "Fiqh Al-Muwa t anah: Nahdlatul Ulama's Interpretation About Citizenship." *Millah: Journal of Religious Studies* Volume 21 (Edisi <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss1.art6.1>): 149–182.
- Sinolungan, Kanaya et al. 2025. "Analisis Yuridis Hak Atas Pewarganegaraan Keturunan Blijvers Dalam Sistem Hukum Indonesia." *lex privatum* Volume 15 (Edisi 5).
- Syahrin, Alvi. 2019. "Naturalisasi dalam Hukum Kewarganegaraan: Memahami Konsep, Sejarah, dan Isu Hukumnya." *Thengkyang* Volume 2 (Edisi 1): 36–53.
<https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/117/118>.
- Tabita, Vensy Eli Maria. 2024. "Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Menurut Hukum Internasional." *Lex Administratum* Volume 12 (Edisi 3).
- Trijanan, Suci et al. 2025. "Evaluasi Keberhasilan Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Dalam Memperkuat Peran Negara Dalam Hubungan

Internasional." Jurnal Imiah Wahana Pendidikan Volume 11 (Edisi 1): 233–247.
<https://doi.org/https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9705>.

Watt, Montgomery. 1956. Muhammad At Medina. Oxford: Clarendon Press.
<https://archive.org/details/muhammatmedina029655mbp/page/n9/mode/2up>.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia. 2024.
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, LN Nomor 63 Tahun 2006, TLN Nomor 4634.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, LN Nomor 2 Tahun 2007, TLN Nomor 4676.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022, LN Nomor 130 Tahun 2022, TLN Nomor 6798.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hakasasi Manusia*, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024, LN Nomor 240 Tahun 2024, TLN Nomor 7000.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan Dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2020, BN Nomor 984 Tahun 2020.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan Dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2024, BN Nomor 170 Tahun 2024.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia*, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2016, BN Nomor 1655 Tahun 2016.